

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK Nomor 44-02-04-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024

Pada hari ini, **Sabtu** tanggal **dua puluh tiga** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **20:00** WIB, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 oleh:

Perseorangan **SEPTINUS TIPAGAU**, **S.I.P.**, **M.P.A. Partai Golongan Karya** untuk Provinsi **Papua Tengah**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada DR. PERIATI BR GINTING, S.H., M.H., M.KN., C.L,A, dkk

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Permohonan yang belum lengkap akan dilengkapi pada saat perbaikan permohonan terhitung 3 x 24 Jam sejak diterbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada Minggu tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat pukul 00:53 WIB.

Plt. Panitera Muhidin





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000 Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman:www.mkri.id

Lampiran: e-AP3 Nomor 44-02-04-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : SEPTINUS TIPAGAU, S.I.P., M.P.A.

Kuasa Hukum : DR. PERIATI BR GINTING, S.H., M.H., M.KN., C.L,A, dkk

Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Papua Tengah

Tahun 2024

Pengajuan Permohonan : 23 Maret 2024 pukul 20:00 WIB

NO.	BERKAS YANG DIAJUKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan (pdf)	1	
2	Permohonan (doc/docx)	1	
3	SK Penetapan Perolehan Suara KPU	1	
4	Surat Persetujuan Partai Politik (pdf)	1	File softcopy yang diunggah berupa draf/konsep Surat Kuasa Khusus DPP Partai Golkar yang belum ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, dan formatnya bukan berupa Surat Persetujuan tertulis.
5	Daftar Alat Bukti (pdf)	1	
6	Daftar Alat Bukti (doc/docx)	1	
7	Alat Bukti (pdf)	1	File softcopy alat bukti sesuai dengan Daftar Alat Bukti, kecuali P-5 yang belum dilampirkan. Semua file alat bukti yang diunggah telah di- nazegelen.
8	Surat Kuasa	1	File softcopy Surat Kuasa yang diunggah ditandatangani oleh Septinus Tipagau selaku Pemberi Kuasa (perseorangan). File Surat Kuasa telah dilengkapi/dilampirkan dengan kartu tanda advokat Kuasa Hukum Pemohon.

Jakarta, 24 Maret 2024 Plt. Panitera, Muhidin

Perhatian:

- Dilarang keras melakukan hal-hal yang mengakibatkan KKN;
- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.
- Perkembangan penanganan perkara dapat dipantau d situs (website) resmi Mahkamah Konstitusi www.mkri.id